

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Adil, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Ed. II, Mitra Wacana Media, Bandung, 2016.

Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Andi Sri Rezky, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Arus Akbar dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia "Suatu Kajian Teoritik"*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2012.

Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*, Setara Press, Malang, 2011.

Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensia Media, Malang, 2017.

Emanuel Sudjarmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung 2014.

Henricus Subekti dan Mulyoto, *Badan Usaha “Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya”*, Cetakan Ketiga, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2017.

Hufron dan Syofyan, *Ilmu Negara Kontemporer “Telaah teoritis asal mula, tujuan dan fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi”*, LaksBang Grafika, Surabaya, 2016.

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Kamlesh K Bajaj Debjani Nag, *E-commerce The Cutting Edge of Business, Terjemahan, Imam Mawardi, E-commerce “Revolusi Baru Dunia Bisnis”*, PT Akana Press, Surabaya, 2000.

Kristian Widya, *Telah Kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia “menuju system penyediaan barang dan penyelenggaraan yang berorientasi publik”*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Lijan Poltak Sinambela, et.al, *Reformasi Pelayanan Publik “Teori, Kebijakan, dan Implementasi”*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan “Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Rahayu Hartini, *BUMN Persero “Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Setara Perss, Malang, 2017.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.rev, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Malang, 2018.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2018.

Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik “Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi”*, Setara Press, Malang, 2012.

Sudaryat, *Hukum Bisnis “Suatu Pengantar”*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.

Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik “Profesi Hukum”*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Bandung 2008.

_____, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Zainal Asikin dan Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, PrenadaMedia Group, Jakarta. 2016.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. DISERTASI/TESIS:

Fidwal Idrajab, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014.

Ivan Satria Wijaya, "*Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara terhadap kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Persero*", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, 2015.

C. JURNAL HUKUM:

Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Universitas Brawijaya, Vol No. 1, Februari Tahun 2014.

Harmiati dan Abdul Aziz Zuhakim, "*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*", Jurnal Hukum, Unihaz Bengkulu.

Yohana, "*Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum*", Jurnal Mercatoria, Vol 8 No 1/Juni 2015.

D. UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

E. DATA ELEKTRONIK:

Galih Gumelar, “*Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2019.

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kemudahan_Berbisnis, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.

<https://kbbi.web.id/usaha>, pada tanggal 10-04-2019.

<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/menkumham-pendaftaran-cv-firma-dan-pt-dimudahkan-secara-online-single-submission>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>, pada tanggal 11 Oktober 2019.

F. SUMBER LAIN:

Hasi Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H Notaris/PPAT Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta 21 Oktober 2019.

Hasi Wawancara dengan Januar Gerungan Valentino, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Brau Kota Tanjung Redep 23 Oktober 2019.

Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

Hasil Wawancara dengan Nurudin Yunus pemilik CV Bintang Jaya Utama, Di Yogyakarta 21 Oktober 2019.